

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR KENCANA MANDIRI
TAHUN 2022**



**Jl. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi 36133
TELEPON: 0741-7553320**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Semakin meluasnya pelayanan disertai meningkatnya volume usaha pada industri perbankan, maka semakin meningkat pula risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka pentingnya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat. Melalui struktur pengendalian internal yang terpadu dan penerapan GCG yang baik diharapkan BPR dapat terhidar atau meminimalkan dampak buruk atas risiko yang kemungkinan akan terjadi pada BPR.

Untuk penerapan suatu Good Corporate Governance yang baik, maka BPR harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam memberikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

b. Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya.

d. Independensi (Independency)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan/ kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	ARIF DARMAWAN
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Koordinator dan Ketua Komite Kredit 2. Mengendalikan Kegiatan Bisnis BPR 3. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Membuat prediksi tentang kondisi lingkungan mikro maupun makro yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja 5. Analisis persaingan pasar 6. Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengawas untuk di sahkan dalam RUPS maupun diluar RUPS. 7. Memberikan usul pada Dewan Komisaris tentang Rancangan Anggaran dan Rencana kerja dan Unit Bisnis Strategis lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RUPS. 8. Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap Unit Kerja yang dipimpinnya. 9. Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan maupun insentif lainnya. 10. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan. 11. Membuat laporan secara periodik kepada/bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 12. Membina dan menjaga hubungan baik/kerja sama secara positif dengan lembaga lain yang terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. 13. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern ekstern. 14. Berupaya mengoptimalkan Laba 15. Menjaga dan memastikan agar BPR yang dipimpin dapat mencapai target yang diberikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup pendanaan, kredit, jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif. 16. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana. 17. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan teladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan. 			
2.	Nama	:	ARIE KUSTIYARTO
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menatausahakan dan mengkoordinir kegiatan Operasional Bank, terutama yang bersifat internal. 2. Memantau perkembangan likuiditas BPR. 			

3. Mendistribusikan dan memonitor pelaksanaan operasional yang dilakukan staff dan karyawan.
4. Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah- langkah penyelesaian masalah operasional bank untuk dibahas dan diputuskan bersama-sama Direktur Utama.
5. Bersama-sama dengan Direktur Utama menetapkan Peraturan Perusahaan.
6. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.
7. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern.
8. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
9. Melakukan fungsi kepatuhan dan meningkatkan budaya sadar risiko disetiap unit kerja.
10. Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku baik Internal maupun eksternal.
11. Mengarahkan dan mendorong staffnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.
12. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.
13. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Berupaya meningkatkan Kredit yang sehat sesuai dengan target Rencana Bisnis.
2. Pemantauan kualitas kredit dalam perhatian khusus agar tidak menjadi Non Performing Loan (NPL).
3. Menjalankan pemberian kredit dengan analisa yang lebih komprehensif dan didukung dengan SDM yang kompeten serta lampiran dokumen yang dapat diverifikasi kebenarannya.
4. Memastikan Seluruh Aktivitas operasional BPR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memantau Debitur yang telah di restrukturisasi khusus Covid-19, terlebih untuk debitur yang memiliki tunggakan lebih dari 30 hari. Melakukan monitoring yang ketat terhadap debitur tersebut serta memberikan saran kepada debitur untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan pola bisnis yang terjadi disaat ini untuk mempertahankan eksistensi usaha debitur.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	UMMI KALSUM SUSANTY
	Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan manapun. 2. Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) yang baik dalam setiap kegiatan BPR. 			

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal, temuan OJK dan atau otoritas lainnya yang berwenang. 6. Melakukan rapat dewan komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku. 												
2.	<table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>DJODI SUHARDI</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan manapun. 2. Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) yang baik dalam setiap kegiatan BPR. 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal, temuan OJK dan atau otoritas lainnya yang berwenang. 6. Melakukan rapat dewan komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku. </td> </tr> </table>	Nama	:	DJODI SUHARDI	Jabatan	:	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab :			<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan manapun. 2. Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) yang baik dalam setiap kegiatan BPR. 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal, temuan OJK dan atau otoritas lainnya yang berwenang. 6. Melakukan rapat dewan komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku. 		
Nama	:	DJODI SUHARDI											
Jabatan	:	Komisaris											
Tugas dan Tanggung Jawab :													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan manapun. 2. Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) yang baik dalam setiap kegiatan BPR. 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal, temuan OJK dan atau otoritas lainnya yang berwenang. 6. Melakukan rapat dewan komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku. 													
	Rekomendasi Kepada Direksi :												
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan target Rencana bisnis bank terutama pada peningkatan pemberian Kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 2. Memperhatikan kredit dalam perhatian khusus agar tidak menjadi NPL dan juga kredit restrukturisasi khusus Covid -19 yang telah memiliki tunggakan lebih dari 30 hari 3. Penguatan Analisa dan manajemen risiko dibidang perkreditan 4. Meningkatkan budaya kepatuhan disetiap aktivitas operasional Bank 												
	Penjelasan Lebih Lanjut :												
	Nihil												

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	

tidak membentuk komite audit, pemantau risiko, dan Remunerasi dan Nominasi

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak membentuk komite

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
2.	Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
Penjelasan Lebih Lanjut				
tidak membentuk komite				

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ARIF DARMAWAN	Rp0,00	0%
2.	ARIE KUSTIYARTO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			

Tidak ada kepemilikan saham anggota direksi baik di BPR Kencana Mandiri ataupun di BPR Lain

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ARIF DARMAWAN	-	-	0%
2.	ARIE KUSTIYARTO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	ARIF DARMAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ARIE KUSTIYARTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi dengan Anggota direksi lain, Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	ARIF DARMAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ARIE KUSTIYARTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat adanya hubungan keluarga antar anggota direksi, Anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	Rp0,00	0%
2.	DJODI SUHARDI	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki saham di BPR Kencana Mandiri			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	-	-	0%
2.	DJODI SUHARDI	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham semua anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DJODI SUHARDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris baik sesama Anggota Dewan komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DJODI SUHARDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan anggota komisaris lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp224.050.019,00	2	Rp230.158.412,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp224.050.019,00		Rp230.158.412,00

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direksi dan Dewan Komisaris menerima gaji/ honorarium sesuai dengan hasil Keputusan RUPS

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selain Gaji/Honorarium.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
------------	--------------

	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0.98 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.69 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji diperoleh dengan memperhitungkan gaji dan tunjangan Pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris yang disetahunkan selama tahun 2022.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	30 Maret 2022	2	1. Pencapaian Kinerja Bulan Februari 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19
2.	11 April 2022	2	1. Pencapaian Kinerja Bulan Maret 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19.
3.	16 Mei 2022	2	1. Pencapaian Kinerja Bulan April 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19 4. Pemantauan perbaikan NPL
4.	09 Juni 2022	2	1. Pencapaian Kinerja Bulan Mei 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19 4. Pemantauan perbaikan NPL 5. Kehati-hatian dalam pemberian kredit yang berkualitas baik.
5.	04 Juli 2022	2	1. Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19 4. Pemantauan perbaikan NPL 5. Kehati-hatian dalam pemberian kredit yang berkualitas baik.

6.	19 Agustus 2022	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian Kinerja Bulan Juli 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19 4. Pemantauan perbaikan NPL 5. Kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan plafond yang besar. 6. Maintenance terhadap debitur bermasalah dan mengutamakan anti fraud
7.	07 Oktober 2022	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian Kinerja Bulan September 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19 4. Pemantauan perbaikan NPL 5. Kehati-hatian dalam pemberian kredit yang berkualitas baik dan mengutamakan anti fraud.
8.	16 November 2022	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian Kinerja Bulan Oktober 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19 4. Pemantauan perbaikan NPL 5. Kehati-hatian dalam pemberian kredit yang berkualitas baik dan mengutamakan anti fraud.
9.	02 Desember 2022	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian Kinerja Bulan November 2022 2. Pelaksanaan SOP Operasional dan kredit 3. Monitoring Debitur yang diberikan Restrukturisasi Covid -19 4. Pemantauan perbaikan NPL 5. Kehati-hatian dalam pemberian kredit yang berkualitas baik dan mengutamakan anti fraud.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran kredit dengan plafon besar agar memperhatikan 5C terutama terkait kemampuan bayar dan karakter calon debitur. 2. Senantiasa responsif terhadap adanya perubahan yang terjadi terutama berkaitan dengan regulasi, ketentuan Pemerintah dan strategi Bisnis 3. Meningkatkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi. 4. Memberikan perhatian pada Kredit yang mendapat relaksasi COVID-19 agar tidak menjadi masalah saat berakhirnya pandemi mengingat masih tingginya outstanding kredit yang gagal di restruktur COVID-19. 5. Melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah yang efektif dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	9	0	100%
2.	DJODI SUHARDI	9	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Seluruh kegiatan rapat Dewan Komisaris tahun 2022 dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat penyimpangan internal selama periode laporan								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2022, Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR adalah gugatan yang dilakukan oleh Eks. Pegawai dimana permasalahan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Atas putusan pengadilan tersebut, BPR telah menerima dan melaksanakan kewajiban secara penuh sesuai dengan hasil putusan pengadilan.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2022.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada kegiatan Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan Politik selama tahun 2022.					

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR KENCANA MANDIRI
Alamat	: Jl. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi 36133
Nomor Telepon	: 0741-7553320
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp7.865.269.617,00
Total Aset	: Rp53.742.198.239,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR KENCANA MANDIRI Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.05	0.41
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.1	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.21	0.221
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3.5	0.35
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.39	0.239
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.1	0.158
Nilai Komposit			2.2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.05)

BPR memiliki 2 orang Anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung Jawabnya, Direksi selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian pada setiap kegiatan operasional BPR. Direksi memiliki kompetensi yang baik dan meningkatkan pengetahuan dibidang perbankan, serta mengikutsertakan pegawai BPR pada pelatihan/sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi SDM.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

BPR memiliki 2 orang anggota Dewan Komisaris. Kedua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang sama dengan kantor BPR. Pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris terhadap BPR sudah berjalan cukup baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR tidak membentuk fungsi Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR selalu berupaya untuk menghindari adanya transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.21)

BPR selalu menerapkan fungsi kepatuhan pada setiap aktivitas operasional BPR. Melakukan penyesuaian terhadap ketentuan- ketentuan terkini serta melakukan pengkinian terhadap peraturan internal agar pelaksanaan kegiatan BPR sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi BPR.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 3.5)

BPR menerapkan fungsi Audit Intern dengan baik di Triwulan I tahun 2022, namun terjadi kekosongan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) sejak Mei 2022 karena Pejabat sebelumnya telah diangkat menjadi Direktur. Sampai dengan Desember 2022 posisi PEAJ belum terpenuhi sehingga fungsi audit intern tidak berjalan sebagaimana mestinya.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan baik pada BPR. Penunjukan KAP telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan KAP telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup audit dan standar profesional akuntan publik. Hasil pemeriksaan KAP cukup menggambarkan kondisi BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.39)

Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Kencana Mandiri sudah cukup baik. Laporan Profil Risiko juga sudah disampaikan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Melakukan Evaluasi secara berkala dan meningkatkan sistem Pengendalian.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

Manajemen selalu memperhatikan BMPK dalam semua aktifitas penyaluran dana. Pada tahun 2022, tidak terjadi Pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Kencana Mandiri telah didukung oleh sistem Informasi yang memadai. Kewajiban Pelaporan terkait dengan transparansi Kondisi keuangan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Manajemen PT. BPR KENCANA MANDIRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan cukup baik.

BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini. Upaya perbaikan pada struktur dan infrastruktur tata kelola dan peningkatan terhadap proses penerapan tata kelola terus dilakukan oleh Manajemen PT. BPR Kencana Mandiri demi mewujudkan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Jambi, 24 Januari 2023

PT. BPR KENCANA MANDIRI



ARIF DARMAWAN
DIREKTUR UTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ummi Kalsum Susanty", written over a horizontal line.

UMMI KALSUM SUSANTY
KOMISARIS UTAMA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR KENCANA MANDIRI Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR KENCANA MANDIRI selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Jambi, 24 Januari 2023

PT. BPR KENCANA MANDIRI



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR KENCANA MANDIRI

ARIF DARMAWAN
DIREKTUR UTAMA



UMMI KALSUM SUSANTY
KOMISARIS UTAMA